

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai ibukota provinsi, dan masuk dalam kategori kota besar, keberadaan pengemis tidak bisa dipisahkan dari Kota Padang. Masalah sosial yang satu ini selalu menjadi momok baik bagi pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Kesenjangan sosial yang muncul di tengah masyarakat, kebutuhan ekonomi yang mendesak, hingga lapangan pekerjaan yang tidak tersedia merupakan alasan dari pengemis melakukan pekerjaan tersebut. Berbagai cara pun telah ditempuh pemerintah Kota Padang dalam menertibkan dan memberikan pelatihan keterampilan terhadap pengemis. Namun, sikap pengemis yang membandel dan tetap melakukan aksinya dengan berbagai cara membuat keberadaannya mulai meresahkan masyarakat. Salah satu alasan mengemis karena terdesak kebutuhan ekonomi dan keadaan fisiknya yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Tingkah pengemis disana pun aneh-aneh, ada yang menggunakan bantalan di badannya sehingga terlihat seperti memiliki benjolan besar dibadannya.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Sosial Kota Padang, pada tahun 2010 sampai 2012 pengemis berjumlah 621 orang dan terus meningkat, pada tahun 2012 terdata sebanyak 745. Dan pada 2013 mengalami penurunan drastis menjadi 299 orang, meningkat kembali pada tahun 2014 dan 2015 menjadi 465 orang. Pada tahun 2016 pengemis yang terdata setelah ditangani oleh Dinas Sosial berjumlah 454 orang. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk menanggulangi masalah pengemis dan anak jalanan, namun upaya ini tak kunjung membuahkan hasil. Masyarakat seharusnya sadar dan bijak dalam menghadapi pengemis, sehingga semua upaya dalam menekan jumlah pengemis dan memberikan efek jera dapat berjalan dengan baik. Di Kota Padang, lokasi tempat berkumpul atau beraktivitas anak jalanan terdapat di lima lokasi, yaitu di perempatan Jalan Khatib Sulaiman, perempatan Kantor Pos besar jalan Sudirman, Pasar Raya Kota Padang, Jalan Ratulangi dan Jalan Patimura, Jalan By pass, perempatan Lubuk Begalung.

Salah satu tempat yang dijadikan lokasi survey berada di pasar raya Kota Padang, salah satunya di sepanjang jalan Permindo. Di depan Toko Buku Sari Angrek. Di lokasi ini banyak ditemukan pengemis anak-anak yang berkeliaran dimana-mana, namun juga berasal dari kalangan orang tua dan dewasa, seperti dirumah makan yang ramai pengunjungnya, pertokoan, dipedestrian dan banyak tempat lainnya yang sering kali dijadikan tempat beroperasi untuk mendapatkan uang dari

banyak orang. Tingkah pengemis disana pun aneh-aneh, ada yang menggunakan bantalan di badannya sehingga terlihat seperti memiliki benjolan besar dibadannya. Kehidupan pengemis dan gelandangan yang tidak luput dari kemiskinan membuat mereka harus tinggal dijalanan, emperan toko, menumpang di rumah keluarga, dan ada juga yang tinggal di kosan. Untuk itu perlunya suatu tempat pembinaan yang dapat menampung pengemis dan gelandangan, yang mana mereka disana diberi pendidikan, dilatih, dibina, dan diberikan pekerjaan sesuai keahlian mereka selama dikarantina, sehingga memiliki keterampilan untuk membuat mereka menjadi lebih mandiri.

1.2. Data dan Fakta

1.2.1. Data

1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pedagang Asongan

1. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Padang nomor 1 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan ditujukan kepada :
 - a. Anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang mengganggu ketertiban umum, keamanan, atau lalu lintas.
 - b. Pelaku eksploitasi yang menyuruh orang atau anak mengemis, atau berdagang asongan
2. Dihimbau kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen agar tidak meminta minta di prapatan jalan atau lampu merah dan dilarang kepada pedagang asongan tidak berjualan di prapatan jalan atau lampu merah, karena akan mengganggu ketertiban dan keamanan lalu lintas
3. Dihimbau kepada masyarakat, pengendara mobil dan sepeda motor agar tidak memberi uang dijalan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan tidak membeli barang dari pedagang asongan karena akan mengganggu ketertiban dan keamanan lalu lintas
4. Diminta kepada orang tua agar melarang anak-anaknya tidak beraktifitas dijalanan dan memberikan pemahaman kepada anak mereka, sebab dikhawatirkan terjadi kecelakaan yang akan membahayakan diri sendiri, disamping itu mengganggu keamanan dan ketertiban lalu lintas serta kenyamanan masyarakat Kota Padang.
5. Diharapkan kepada masyarakat tidak memberi sumbangan dijalan, berikan bantuan dan sumbangan anda pada tempatnya (yayasan/panti/organisasi social dan lain lain)
6. Berdasarkan pasal 40 :

- a. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan usaha pembinaan bagi pelaku eksploitasi atas anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan atau pengamen
 - b. Usaha pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 1. Pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan undang undang perlindungan anak melalui perorangan maupun kelompok lewat media elektronik, rumah ibadah, brosur, pamflet, spanduk atau dialog interaktif
 2. Melakukan pemantauan, pengamatan dan pengawasan sebagai upaya untuk mengetahui pelaku eksploitasi
 - c. Pelaku eksploitasi yang telah dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih melakukan eksploitasi atas anak jalanan, gelandangan, pengemis dan atau pengamen akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Berdasarkan pasal 56 setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 40 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Tabel 1.1. Data Pengemis dan Gelandangan 12 tahun terakhir

	2006	2007	2008	2009	2010	2014	2015	2016	2017
Pengemis	250	250	250	230	210	35	55	65	29
Gelandangan	179	-	-	159	-	1	5	10	3

Sumber : Dinas Sosial Kota Padang, 2017

Pada tabel diatas menjelaskan data pengemis dan gelandangan dalam 12 tahun terakhir, data diatas merupakan pengemis yang berhasil ditangkap oleh Satpol PP yang kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Kota Padang untuk ditanggulangi. Sementara pengemis dan gelandangan yang tidak terdata pada tabel tersebut dipulangkan ke daerahnya masing masing.

Tabel 1.2. Data total pengemis dan gelandangan di Kota Padang

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pengemis dan Gelandangan	621	683	745	299	301	465	454

Sumber : Dinas Sosial Kota Padang, 2016

Tabel 1.3. Data Pengemis dan Gelandangan Di Kota Padang Tahun 2016

No	Data Pengemis dan Gelandangan	Tahun 2016		Kategori Umur						
		Laki-laki	Perempuan	Balita	Anak-anak	Remaja	Dewasa	Lansia	Manula	Tidak Diketahui
		43	18	1	7	16	17	11	1	8

Sumber : Satpol PP Kota Padang, 2018

Tabel 1.4. Data Pengemis dan Gelandangan Di Kota Padang Tahun 2017

No	Data Pengemis dan Gelandangan	Tahun 2017		Kategori Umur						
		Laki-laki	Perempuan	Balita	Anak-anak	Remaja	Dewasa	Lansia	Manula	Tidak Diketahui
		44	26	1	3	12	14	19	1	20

Sumber : Satpol PP Kota Padang, 2018

1.2.2. Fakta

Sebagai ibukota provinsi, dan masuk dalam kategori kota besar, keberadaan pengemis tidak bisa dipisahkan dari Kota Padang. Masalah sosial yang satu ini selalu menjadi momok baik bagi pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Kesenjangan sosial yang muncul di tengah masyarakat, kebutuhan ekonomi yang mendesak, hingga lapangan pekerjaan yang tidak tersedia merupakan alasan dari pengemis melakukan pekerjaan tersebut. Berbagai cara pun telah ditempuh pemerintah Kota Padang dalam menertibkan dan memberikan pelatihan keterampilan terhadap pengemis. Namun, sikap pengemis yang membandel dan tetap melakukan aksinya dengan berbagai cara membuat keberadaannya mulai meresahkan masyarakat.

Motif pengemis dalam menjalankan aksi banyak titik yang dijadikan tempat mangkal para pengemis di Kota Padang, diantaranya perempatan dan kantor pos di Jalan Khatib Sulaiman, Pasar Raya, Jalan Ratulangi dan Jalan Patimura, Jalan By Pass, perempatan Lubuk Begalung. Cukup mencengangkan memang, jika melihat pendapatan yang bisa didapatkan oleh seorang pengemis. Dalam sehari, minimal mereka bisa mendapatkan Rp100.000,00, sehingga jika ditotalkan selama sebulan mereka bisa mengantongi Rp3.000.000,00. Pendapatan yang tergolong besar jika dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Padang tahun 2015 yang hanya Rp1.615.000,00. Melihat kondisi tersebut, wajar saja jika banyak pengemis yang tidak mau beralih dari pekerjaannya.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Sosial Kota Padang, pada tahun 2006-2008 jumlah pengemis yang terdata sebanyak 250 orang. Selama tiga tahun tersebut, jumlah pengemis cenderung *stag* dan tidak berubah. Namun pada tahun 2009 - 2010, jumlah pengemis mengalami

penurunan sebanyak 20 persen. Karena yang terdata pada tahun tersebut berjumlah 230 orang. Sedangkan sisanya pada tahun 2010 pengemis yang terdata setelah ditangani oleh Dinas Sosial berjumlah 210 orang.

Terkait dengan data tersebut, Bapak Mahyeldi Ansharullah, Walikota Padang mengatakan pengemis merupakan salah satu dampak kemiskinan di Sumatera Barat (Sumbar). “Munculnya pengemis ini menunjukkan adanya fakta kemiskinan di Sumbar. Kenapa Sumbar? Karena pengemis di Padang tak hanya berasal dari Padang tapi juga pendatang dari daerah sekitar Kota Padang”. Senada dengan Walikota Kota Padang, Bapak Duski Samad, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padang mengatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi jumlah pengemis di Kota Padang. Pertama, ada aktor yang bermain di belakang pengemis. Kedua, struktur masyarakat yang tidak berpihak kepada orang-orang lemah. Ketiga, mental masyarakat yang tidak mau bekerja keras. “Ada namanya pengemis rental, di mana mereka dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Di sisi lain, pengemis juga lemah dari segi ekonomi dan pendidikan. Sehingga pengemis terlihat tidak pernah ada habisnya,” ujar Duski yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang ini.

Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk menanggulangi masalah pengemis dan anak jalanan, namun upaya ini tak kunjung membuahkan hasil. “Pemerintah Kota Padang telah menyekolahkan pengemis pada usia sekolah, membina pengemis dengan memberikan pelatihan, dan memulangkan para pengemis ke daerahnya masing-masing. Namun biasanya, setelah diberikan pelatihan mereka kembali mengemis,” ungkap Bapak Mahyeldi.

Bapak Amrizal, Kasi Trantib Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyatakan tiap harinya Satpol PP sudah melakukan berbagai usaha untuk menertibkan dan mengurangi jumlah pengemis dan anak jalanan. “Satpol PP sejauh ini terus berusaha mengurangi jumlah pengemis. Seperti melakukan penjangkauan setiap harinya kepada pengemis, anak jalanan, pedagang asongan, dan pengamen. Selain itu, membentuk Tim Elang yang khusus untuk menertibkan pengemis, anak jalanan, pengamen, dan orang gila yang bekeliaran di jalan raya,” ujarnya. Bapak Amrizal menegaskan anak jalanan, pengemis, dan pengamen yang mengganggu ketertiban saja yang ditangkap. “Ketika pengemis tersebut belum mengganggu tata tertib, kami masih bisa mentolerirnya. Namun, jika sudah terusik rasa nyaman masyarakat, Satpol PP akan berusaha untuk menemukannya,” tegasnya. Bapak Amrizal juga mengungkapkan anak jalanan, pengemis, pedagang asongan, dan pengamen yang tertangkap akan dibawa ke Dinas Sosial. “Kami berkoordinasi

dengan Dinas Sosial, pengemis yang tertangkap akan dibawa ke panti sosial untuk diberikan keterampilan. Sedangkan untuk anak yang di bawah umur akan dimasukkan ke panti asuhan,” ungkapnya. Hal ini terbukti, setelah dibawa ke panti sosial banyak pengemis yang sekarang menjadi teknisi handphone, supir angkutan umum, dan lain-lain.

Selain melakukan penertiban, Mahyeldi menghimbau seluruh masyarakat Kota Padang untuk tidak memberikan sumbangan kepada para pengemis. “Sebenarnya sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengemis dan anak jalanan. Selain itu Pemerintah Kota Padang juga sudah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada pengemis. Karena dengan memberikan uang, akan mendorong mereka terbiasa meminta-minta,” tambahnya.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebenarnya telah menjalankan peran mereka untuk meminimalisir pengemis dan anak jalanan. “Kami dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja telah memberikan penyuluhan, sosialisasi, agar tidak mengemis lagi, tidak berdiri di perempatan jalan,” kata Freisdawati A. Boer, Kepala Dinas Sosial Kota Padang. “Untuk menyadarkan anak jalanan, gelandangan, pengemis, jika memang faktor ekonomi yang menuntut mereka untuk mengemis maka mereka akan diberikan semacam pelatihan kelompok usaha bersama. Seperti memberikan pelatihan montir sepeda motor untuk bekal mereka nantinya. Agar mereka bisa bekerja dengan layak dan bisa memperbaiki perekonomiannya,” tambahnya.

Untuk memberikan efek jera bagi pengemis, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sudah memberikan peringatan agar tidak turun ke jalanan lagi. “Mereka harus membuat surat perjanjian, jika mereka turun ke lapangan setelah dipulangkan ke daerah asal maka mereka akan ditangkap dan ditahan oleh Satpol PP. Selanjutnya Satpol PP akan melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk ditindaklanjuti,” ujar Freisdawati.

Jelang bulan Ramadan, biasanya jumlah pengemis di Kota Padang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal inilah yang coba diantisipasi oleh MUI dengan memberikan himbauan kepada seluruh pengemis. Himbauan yang dilakukan MUI ini jika dilihat dari sudut pandang tertentu dapat berjalan efektif. “MUI akan memberikan imbauan untuk menertibkan tempat yang menyimpang dari kontrol sosial, salah satunya adalah tempat hiburan malam. Salah satu bentuk dukungan MUI dalam mengurangi pengemis adalah dengan mengadakan subuh mubarakah,” tutur Guru Besar Ilmu Tasawuf IAIN Imam Bonjol ini.

Melihat fenomena di atas, permasalahan pengemis tidak akan kunjung usai jika usaha preventif hanya dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat seharusnya sadar dan bijak dalam menghadapi pengemis. Kadang, pemberian dari masyarakat lah yang membuat mereka terus ‘candu’ melakukan hal tersebut. Tak ayal, mereka melakukan berbagai cara agar mendapatkan belas kasihan dari masyarakat padahal realitanya tidak selalu demikian. Masyarakat harus pintar dalam menghadapi ‘kepintaran’ pengemis, sehingga semua upaya dalam menekan jumlah pengemis dan memberikan efek jera dapat berjalan dengan baik.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah akan menjadi penentu apa bahasan yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, kemudian akan dijawab dalam proses penelitian dan tertuang secara sistematis dalam laporan penelitian. Semua bahasan dalam laporan penelitian, termasuk juga semua bahasan mengenai kerangka teori dan metodologi yang digunakan, semuanya mengacu pada perumusan masalah. Oleh karena itu, ia menjadi titik sentral

1.3.1. Permasalahan Non Arsitektural

- a. Bagaimana klasifikasi pengemis dan gelandangan di Kota Padang?
- b. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah pengemis di Kota Padang?

1.3.2. Permasalahan Arsitektural

- a. Bagaimana perencanaan dan perancangan bangunan dan site plan (ruang dalam dan ruang luar) tempat pemberdayaan pengemis dan gelandangan di Kota Padang?
- b. Bagaimana ketersediaan wadah fasilitas bagi pengemis dan gelandangan di Kota Padang dengan upaya preventif?

1.4. Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Padang karena itu tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia, oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan. Disamping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, juga bertujuan untuk memberikan rehabilitasi serta lapangan kerja kepada gelandangan dan pengemis

1.4.2. Sasaran

Memberikan wadah kepada pengemis dan gelandangan sebagai tempat mencari nafkah sehingga mempunyai penghasilan tanpa harus mengemis. Diharapkan pengemis dan gelandangan memiliki rasa malu untuk meminta-minta dan mempunyai keahlian yang mempunyai nilai jual sehingga mampu membuka lapangan kerja sendiri. Sehingga tercapainya taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga negara